



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

(LKjIP)

2022

LAPORAN
KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA 2022

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

Disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Sulawesi selatan

Kami dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengucapkan Banyak terimakasih kepada pihak yang turut membantu terutama Sekretaris Dewan, kepala Bagian dan sub koordinator yang memberikan kami data, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Kinerja 2022 Sekretariat DPRD; Adapun mereka adalah ;

Drs.A.Alimuddin.M,S.Sos (Plt. Sekretaris Dewan)
Ishan Samin,SP.MM (Kabag Persidangan Dan Perundang-Undangan)
H.Syamsul Bahri,S.Sos,M.M (Kabag Keuangan)
Salman,SE.,M.Si (Kabag Fasilitas Penganggaran & Pengawasan)
Idrus,SE.,M.Si (Kabag Umum)
Agustina,S.Sos.,M.Si (Sub K.Koord. Perencana & Penganggaran)
Anwar,S.H.,M.H (Sub.Koord.Kajian Perundang-Undangan)
Drs.H.Tola.,MM (Sub.Koord.Persidangan & Risalah)
Hartina,SH (Sub Koord.Fasilitas Pengawasan)
Kemal,S.Sos.,M.Si (Sub.Koord.Fasilitas Fasilitas Penganggaran)
Nurhaliah,S.Sos (Sub.Koord.Verifikasi)
Hamiah,S.Sos (Sub.Koord.Akuntansi & Pelaporan)
A.Maryam,S.Si (Kasubag Tata Usaha & Kepegawaian)
Masniah S.Sos (Kasubag Rumah Tangga)

DAFTAR ISI



PENDAHULUAN

01

- 7 UMUM
- 8 ORGANISASI
- 13 ISU STRATEGIS
- 14 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



PERENCANAAN KINERJA

02

- 17 TUJUAN DAN SASARAN
- 19 STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
- 22 INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 23 PERJANJIAN KINERJA
- 24 STANDAR PENILAIAN KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

03

- 28 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

44 REALISASI ANGGARAN



PENUTUP

04

44 CATATAN PENUTUP

44 LAMPIRAN

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 dapat selesai sesuai target yang direncanakan.

Laporan ini memuat aspek Perencanaan, Perjanjian Kinerja dan Akuntabilitas yang memberikan gambaran capaian kinerja, analisa, serta rencana tindak lanjut terhadap Target Indikator Utama Sekretariat DPRD di tahun kedepan.

Semoga Laporan LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, efektif, efisien serta berkelanjutan.

Watampone, 23 Januari 2023

Plt. Sekretaris DPRD Kab. Bone



A. ALIMUDDIN S. Sos
Paralegal Pembina Utama Muda
Nip. 1963/014 198410 1 005



Lomba senam Kreasi HUT
Proklamasi 17 Agustus
2022, lokasi halaman pelataran
planet cinema kab.Bone

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022.....	11
Tabel 2.1. Matriks, tujuan dan sasaran Renstra 2018-2023.....	18
Tabel 2.2. Tujuan,Sasaran,Strategis,Dan Arah Kebijakan,Sekretariat DPRD Kab.Bone.....	21
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kab.Bone.....	22
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kab.Bone.....	24
Tabel 3.1. Target Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	30
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018-2023.....	35
Tabel 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan Kegagalan.....	38
Tabel. 3.6. Analisis Dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	43
Tabel. 3.7. Analisis Program /Kegiatan /Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	49
Tabel. 3.8. Realisasi Anggaran.....	57

DAFTAR GAMBAR

Grafik. 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	12
Grafik. 1.2. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang...12	
Grafik. 3.1. Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.....	33
Grafik. 3.2. Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	33
Grafik. 3.3. Persentase Memfasilitasi Ranperda.....	34



01

PENDAHULUAN

- ☞ **UMUM**
- ☞ **ORGANISASI**
- ☞ **ISU STRATEGIS**
- ☞ **ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

BAB I

PENDAHULUAN

P erencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Bone.



Penyampaian Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. Hal ini diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2018-2023

Sekretariat DPRD, dan juga Penetapan Kinerja Tahun 2022 serta dalam rangka pencapaian misi dan visi Bupati dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu kegiatan kinerja serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi perbaikan kinerja ke depan.

B. Organisasi

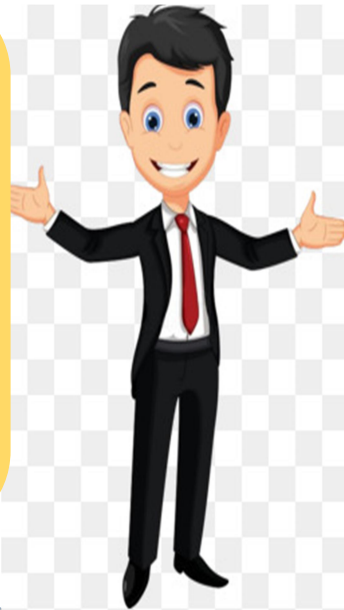
Ciri – Ciri Organisasi :

- ☞ Organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk dicapai bersama, artinya Organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri, selagi untuk kepentingan bersama anggota.
- ☞ Organisasi mempunyai aturan, aturan tersebut harus di taati oleh setiap anggota. Tujuan aturan tersebut ditaati agar organisasi terkendali dan terorganisir.
- ☞ Adanya organisasi untuk mencapai tujuan, maka diperlukan adanya kerja team.



**a. Tugas Pokok
Sekretariat DPRD
Kabupaten Bone :**

Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan



**b. Fungsi Sekretariat
DPRD Kabupaten Bone :**

- Penyelenggara Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggara Administrasi Keuangan DPRD;
- Fasilitasi penyelenggaraan Rapat DPRD
- Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.



RAPAT PARIPURNA



STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD (Perbup 64 Tahun 2021) terdiri dari :



SEKRETARIS DEWAN



A. ALIMUDDIN M.S.Sos
PEMBINA UTAMA / IV,c
NIP : 19631014 198410 1 005

KABAG UMUM



IDRUS, SE., M.Si
PENATA TINGKAT I III / d
NIP : 19810618 201101 1 007

KASUBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



ANDI MARYAM, S.Si, M.A.P
PENATA TINGKAT I III / d
NIP : 19870826 201101 2 014

KASUBAG RUMAH TANGGA



MASNIAH, S.Sos
PENATA TINGKAT I III / c
NIP : 19770701 200701 2 018

KASUBAG PERLENGKAPAN

KABAG KEUANGAN



H. SYAMSUL BAHRI, S.Sos, M.M
PENATA TINGKAT I IV / b
NIP : 19660902 198603 1 007

SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN/PERENCANA AHLI MUDA



AGUSTINA, S.Sos, M.Si
PENATA TINGKAT I III / c
NIP : 19810830 200604 2 011

SUB KOORDINATOR VERIFIKASI/ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



NURHALIAH, S.Sos
PENATA TINGKAT I III / d
NIP : 19651231 198607 2 001

SUB KOORDINATOR AKUNTANSI DAN PELAPOR/ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



HAMIAH, S.Sos
PENATA TINGKAT I III / d
NIP : 19721106 199203 2 007

KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN



SALMAN, SE., M.Si
PENATA TINGKAT I IV / a
NIP : 19730712 200904 1 002

SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGANGGARAN/ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



KEMAL, S.Sos, M.Si
PEMBINA IV / a
NIP : 19721122 200003 1 003

SUB KOORDINATOR FASILITASI PENGAWASAN/ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA



HARTINA, S.H
PENATA TINGKAT I III / d
NIP : 19740208 200801 2 008

SUB KOORDINATOR KEJA SAMA DAN ASPIRASI/PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA



A. NURLAELAH, S.Sos
PENATA TINGKAT I III / d
NIP : 19650919 198801 2 001

KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN



ISHAN SAMIN, SP, M.M
PENATA TINGKAT I IV / b
NIP : 19700404 199503 1 004

SUB KOORDINATOR PERSIDANGAN DAN PERISALAH/PERISALAH LEGISLASI AHLI MUDA



Drs. H. TOLA, M.M
PENATA TINGKAT I IV / a
NIP : 19651231 199303 1 093

SUB KOORDINATOR KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA



ANWAR, SH, MH
PEMBINA IV / a
NIP : 19760920 200604 1 005

SUB KOORDINATOR HUMAS, PROTOKOL DAN PUBLIKASI/PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA





Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mempunyai Sumber Daya Manusia Sebanyak 152 Orang Terdiri Dari :

1. Pejabat Struktural Sebanyak 7 orang.
2. Pejabat Fungsional sebanyak 8 orang.
3. Fungsional umum sebanyak 23 orang
4. Tenaga Honorer/ Kontrak sebanyak 129 orang



Tabel 1.1

SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022

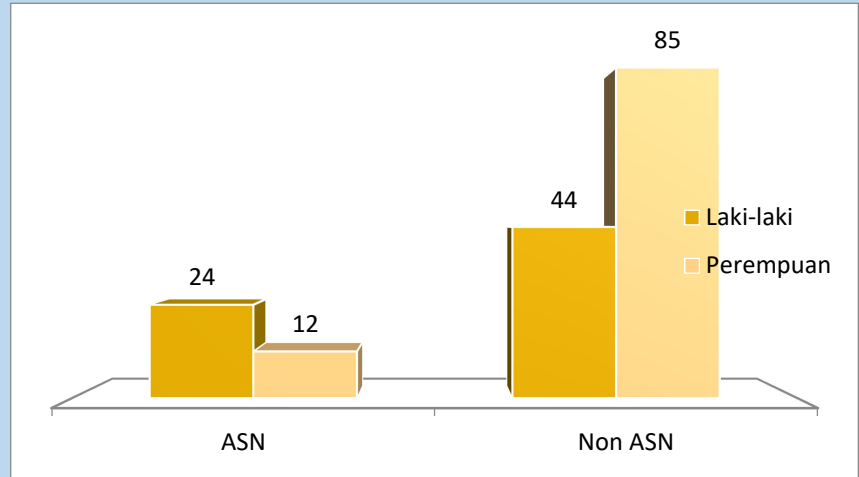
No.	Pendidikan	Jumlah	No.	Gol.	Jumlah	No.	Jabatan	Jumlah
1	SD	0	1	I	0	1.	Fungsional	8
						2.	Struktural	
2	SMP	1	2	II	8	Eselon II = 1 Orang		
3	SMA	11	3	III	19	Eselon III = 4 Orang		
4	Diploma/ D3	0	4	IV	0	Eselon IV = 2 Orang		
5	Strata 1	13				2.	Pelaksana	22
6	Strata 2	9						

Sumber data : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2022



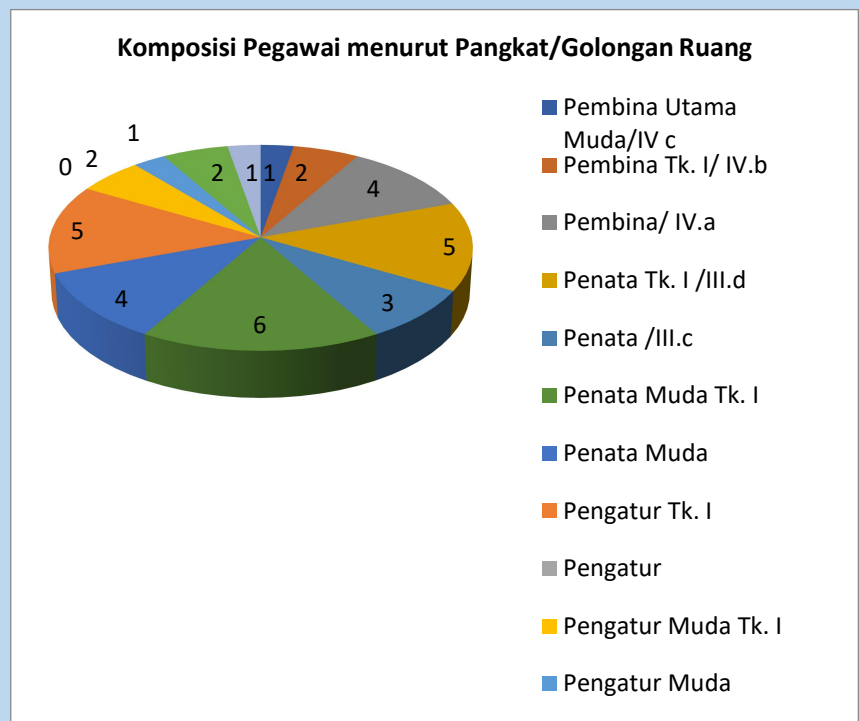
Grafik 1.1

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tahun 2022

Grafik 1.2



sumber : Bagian tata usaha dan Kepegawaian Tahun 2022



Isu Strategis

Isu-isu strategis yang melingkupi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten bone sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan "meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

dalam mendukung kualitas layanan kinerja DPRD dan menjamin kualitas informasi aktivitas DPRD kepada masyarakat", antara lain sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka kemiskinan dipedesaan menyebabkan kesejahteraan masyarakat berkurang. Hal ini dapat menjadi perhatian bagi Sekretariat DPRD kabupaten Bone agar dapat menjaring aspirasi positif sebanyak-banyaknya dari masyarakat untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan, terutama dipedesaan.
2. Adanya penyederhanaan birokrasi dan pemerintahan simetris – asimetris menjadi tantangan tersendiri bagi sekretariat DPRD kabupaten bone untuk tetap konsisten dan maksimal dalam melaksanakan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone dengan tugas dan fungsinya.
3. Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menyebabkan SDM di Sekretariat DPRD kabupaten bone harus mampu beradaptasi dan menambah wawasan terkait kemajuan teknologi dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bone.

B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek Strategi adalah pemetaan dan analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal organisasi serta sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyusun langkah – langkah operasional dan sarana mencapai tujuan.

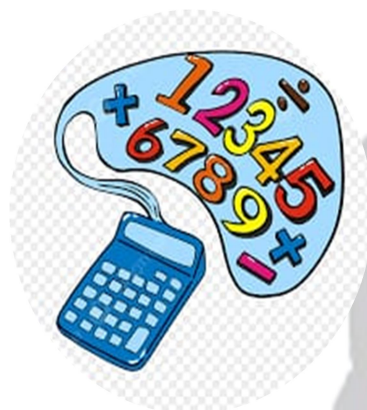
Setiap Organisasi pasti memiliki aspek strategi dalam menjalankan roda organisasi.

Strategi dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan guna mencapai tujuan organisasi.

Pelaksanaan strategi organisasi yang sudah menjadi pedoman inilah yg disebut aspek strategi dalam budaya organisasi.



PERUMUSAN ISU STRATEGI



Isu Strategis

Tujuan Strategis

Indikator

Apa pilihan kebijakan dasar

Apa Fokus utama yang dituju

Kondisi yang harus ada dan sangat penting

PERUMUSAN ASPEK STRATEGI ORGANISASI



Analisa lingkungan eksternal

Analisa lingkungan Internal

Perumusan issue strategis

Penyusunan Strategi



E. Untuk memberikan arah dan kebijakan dari pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan daerah, berikut sasaran yang terdapat dari Sekretariat DPRD adalah sebagai

- 1, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 2.Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan.



**Data Dukung
Renstra
Perubahan**

02

PE RENCANAAN KINERJA



Tujuan & Sasaran



Strategi & Arah Kebijakan



Indikator Kinerja Utama



Perjanjian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran



Dalam rangka mewujudkan visi daerah “ Terwujudnya Masyarakat Bone, Mandiri, berdaya saing dan sejahtera. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), dengan Misi daerah yang pertama “

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, bersih, dan bebas korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Secara singkat tujuan dan sasaran perangkat daerah dijelaskan mendukung tujuan dan sasaran yang tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.



Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD Yang Menunjang Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	71%	72%	73%	74%	78%
	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang di akomodir Unsur Pimpinan dan Anggota Yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	B	BB	BB

Sumber Data : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD 2018-2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk

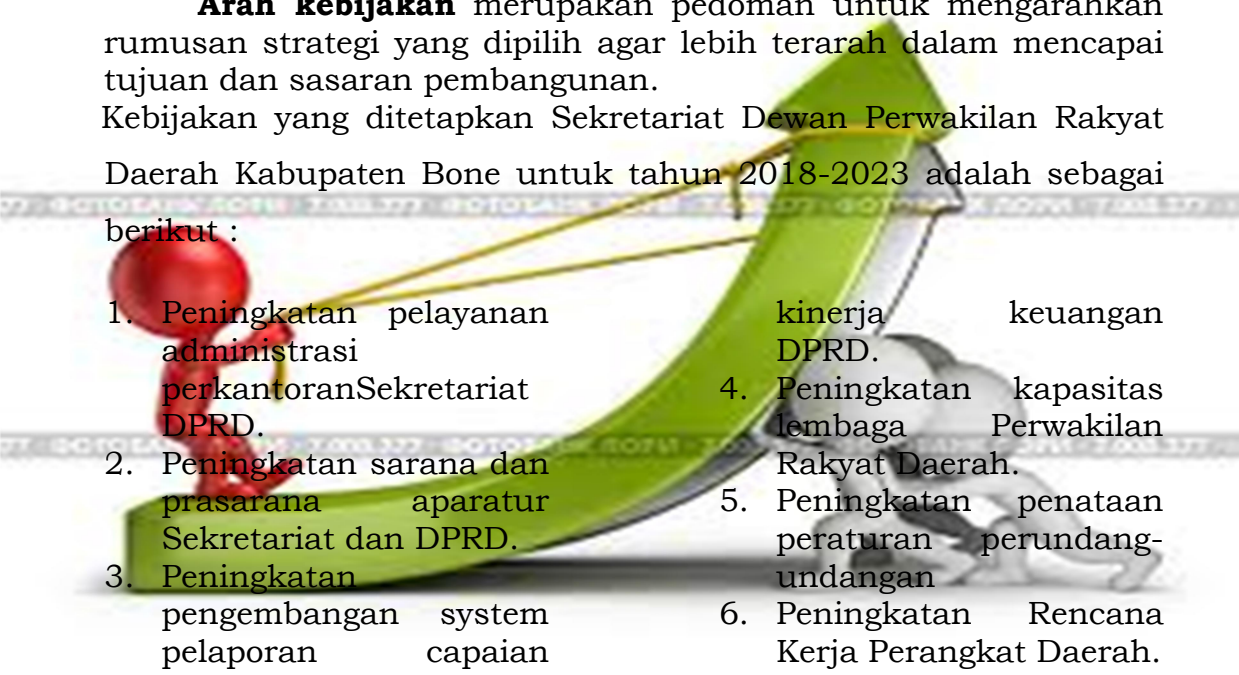
melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikutkan dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.
3. Mengoptimalkan Sistem Pendataan, pelaporan, evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.
4. Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.
5. Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan rapat alat kelengkapan DPRD dan rapat Paripurna.
6. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
7. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses DPRD.


2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 
- | | |
|---|--|
| 1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD. | kinerja keuangan DPRD. |
| 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Sekretariat dan DPRD. | 4. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. |
| 3. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian | 5. Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan |
| | 6. Peningkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. |

Perumusan Strategi :



☞ **Strategi merupakan langkah - langkah yang berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.** Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.(Strategi Focussed - management)

☞ Perumusan arah kebijakan :

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. **Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.**

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategis Dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Meningkatkan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Pelaksanaan Rapat alat kelengkapan DPRD dan Rapat Paripurna	1. Peningkatan Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD
	2. Meningkatkan Aspirasi Masyarakat Yang Terakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	1. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan.	1. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembahasan Perda.
		2. Meningkatkan penyerapan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat melalui dengar pendapat, dan reses Anggota DPRD	2. Peningkatan pelaksanaan reses Anggota DPRD dalam penyerapan aspirasi masyarakat.
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dengan mengikutkan dalam diklat/bimtek/ sosialisasi dan lain-lain.	1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
		2. Meningkatkan penyediaan perlengkapan administrasi perkantoran.	2. Peningkatan ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor serta sarana dan prasarana Sekretariat dan DPRD.
		4. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.	3. Peningkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah
		5. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.	6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan DPRD.
		7. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan penyediaan perlengkapan sesuai kebutuhan.	

Sumber Data: Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Bone Tahun 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama



IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone. IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	(Indeks Kepuasan Masyarakat) Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Anggota DPRD pada Bagian Umum Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
2	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat Yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditindak Lanjuti oleh DPRD	$\frac{\text{Jumlah Aspirasi yang ditindak Lanjuti oleh DPRD}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aspirasi}} \times 100\%$	Aspirasi Masyarakat pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretaris DPRD
		Persentase Memfasilitasi Ranferda	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rancangan Perda}} \times 100\%$	Usulan Pemerintah Daerah/ Eksekutif dan Inisiatif DPRD pada Bagian Persidangan dan Risalah	Sekretaris DPRD
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Angka Nilai dari Inspektorat	SAKIP oleh APIP	Sekretaris DPRD

Sumber Data : Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone



QR-Data Dukung IKU

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus Meningkatkan Kinerjanya serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi



Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat di lihat dari bar code berikut:



Tabel. 2.4

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74 %	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 18,308,053,550,-
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%		
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat Dewan	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.659.428.086,-
Jumlah				Rp. 46.967.482.086,-

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022

E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka Maksimum capaian setiap Indikator Kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada

angka capaian kinerja 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase hasil capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0;

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Capaian Target Indikator Kinerja adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi*})}{\text{Target **})} \times 100 \%$$

3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja capaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membuat capaian rata-rata atas capaian indikator sasaran.
4. Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

NILAI %	PENCAPAIAN
110 ke atas	Sangat Berhasil/ Sangat Berhasil
$90 \leq x < 100$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup Tercapai/ Cukup Berhasil
$x < 60$	Tidak Tercapai/ Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Adapun skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 Tahun 2015 yang terdiri dari :

KATEGORI	SKOR
AA (Sangatmemuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (SangatBaik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (Dua)
D (SangatKurang)	1 (Satu)

03

AKUNTABILITAS KINERJA



Capaian Kinerja Organisasi



Realisasi Anggaran

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kab. Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD, Pengukuran kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap

indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja

tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab. Bone meliputi :

Tujuan 1 : Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Indikator 1

Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Sasaran 2

Meningkatnya Aspirasi Masyarakat Yang Di Akomodir unsur Pimpinan Dan Anggota DPRD

Indikator 1

Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Di Akomodir Unsur Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD

Indikator 2

Persentase Memfasilitasi Ranperda

Tujuan 2 :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD.

Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD



Indikator 1

Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas

dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Pengukuran Target Kinerja dari sasaran Strategis yang telah ditetapkan Oleh Sekretariat DPRD Kab. Bone Tahun

2022 dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi kinerja :

Tabel.3.1

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Ket.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	74%	87%	117%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100%	95%	95%	Berhasil
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%	Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB*	100%	Berhasil
Rata-rata				103	Berhasil

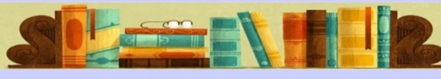
Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab.Bone



Data Dukung

QR – Capaian Kinerja

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat diketahui bahwa realisasi target kinerja tahun 2022 sebagai berikut :



KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PELAYANAN DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

1: Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

DPRD diperoleh melalui link kuisioner survey yang di sebarakan melalui Google Form sebanyak 45 orang, dari hasil survey diperoleh nilai **87 %**.



2 : Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD,

Dengan capaian **95%**. kategori "**Berhasil**" (nilai ini diperoleh dari jumlah aspirasi yang ditindak lanjuti oleh DPRD tahun 2022 yaitu 23 Aspirasi dibagi jumlah Keseluruhan Aspirasi tahun 2022 yaitu 24 Aspirasi x 100%) terdapat 1 aspirasi yang belum ditindak lanjuti.



3 : Persentase Memfasilitasi Ranperda, dengan capaian

100% kategori "**Berhasil**" (Nilai ini diperoleh dari jumlah Ranperda yang ditetapkan, dibagi dengan jumlah Ranperda yang direncanakan x 100%), untuk tahun 2022 Ranperda yang ditetapkan sebanyak 9 Perda dan jumlah Ranperda yang direncanakan sebanyak 9 Perda.

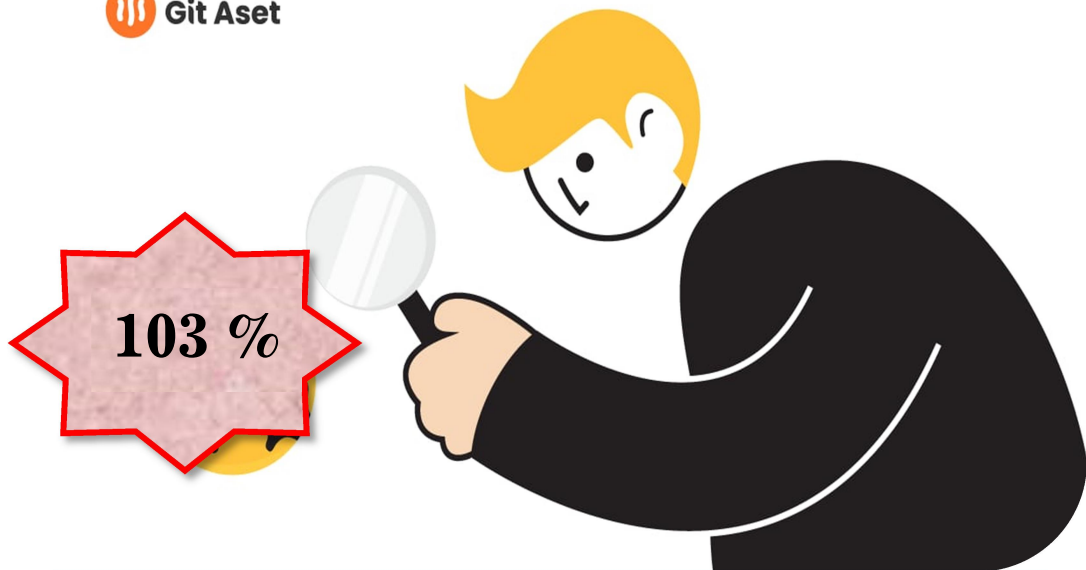


4 : Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Pada Tahun 2021 mencapai predikat BB dengan target B, sehingga **BB** mengalami peningkatan, namun untuk tahun 2022 belum dilakukan penilaian oleh APIP sehingga dilakukan evaluasi Internal SAKIP pada Lingkup Sekretariat DPRD Kab. Bone dengan Nilai Prediksi **BB**.

CAPAIAN KINERJA 2022

 Git Aset

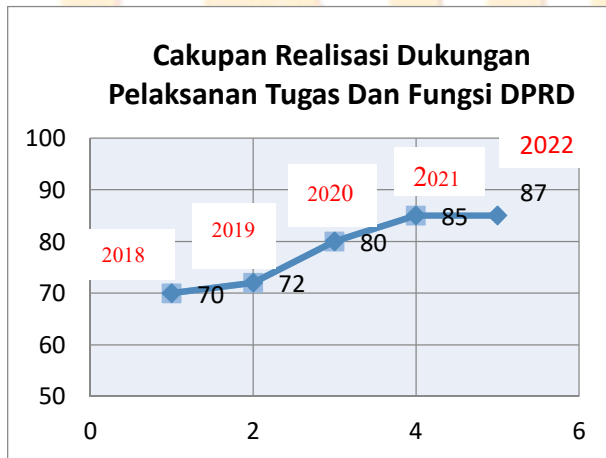


Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat dari rata-rata capaian Kinerja Sekretariat DPRD adalah **103%** atau dengan Kriteria **“Berhasil”**

Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian Kinerja

Tahun 2018-2023

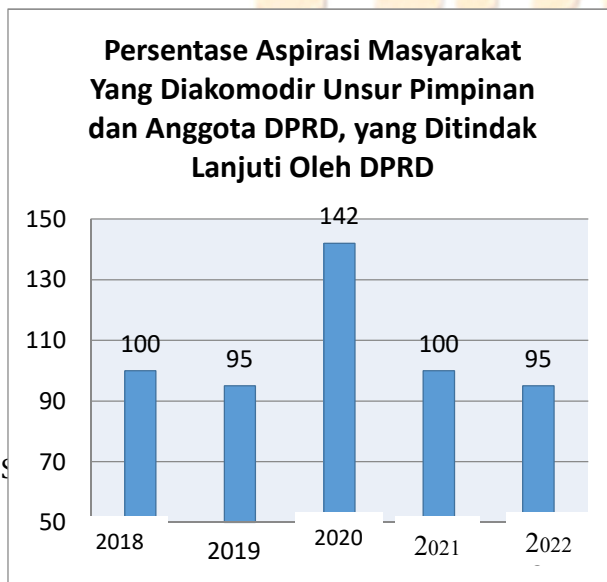
Grafik 3.1



Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan secretariat DPRD yaitu sebesar **87%** Naik secara signifikan dari tahun 2018 telah melebihi target akhir Renstra, sebesar **75%**

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022

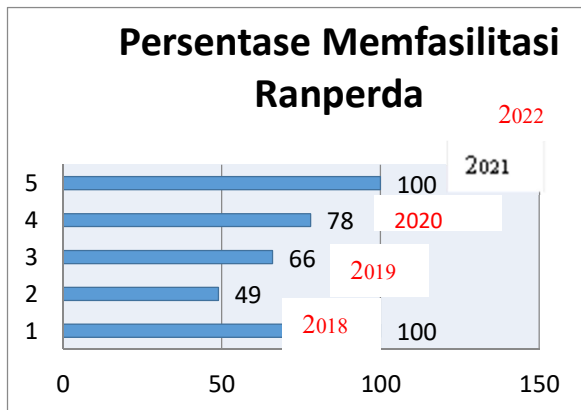
Grafik 3.2



Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir unsur pimpinan dan anggota DPRD, yang ditindak lanjuti oleh DPRD.

Tindak Lanjut Atas Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD dari 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami Fluktuasi, hal ini disebabkan karena semakin padatnya agenda DPRD, namun Aspirasi yang tertunda pada tahun lalu, akan ditindak lanjuti pada tahun berjalan.

Grafik 3.3



Persentase Memfasilitasi Ranperda, Terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ketahun. Hal ini disebabkan karena adanya sinergitas antara DPRD, OPD terkait, dan sekretariat DPRD dalam proses penyusunan Ranperda

☞ Predikat Evaluasi Sakip Oleh Apip

Predikat Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD, sejak Tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun dan berada di level BB pada

tahun 2022, hal ini dicapai karena adanya perbaikan system akuntabilitas internal di Sekretariat DPRD Kab.Bone.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target

jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kab.Bone Tahun 2018 – 2023.

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan perhitungan capaian kinerja Evaluasi SAKIP

berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 Tahun 2015.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target
Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75	72	80	85	87	-
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100	95,47	142,8	100	95	-
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100	49,26	66,66	78	100	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	B	B	B	BB	-

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kab.Bone Tahun 2022

☞ **Cakupan Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD** (Indeks Tingkat Kepuasan Anggota Dewan Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD).
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra Sekretariat

DPRD Kab. Bone Tahun 2018-2023, target akhir renstra 75% sedangkan Indeks Tahun 2022, **87% (87/75x100%)** sehingga capaian kinerja **114%**, kategori **"Sangat berhasil"**.Telah melebihi target akhir Renstra.

116 %

☞ **Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota**
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target

akhir Renstra dengan nilai 100% sedangkan realisasi nilai tahun 2022 sebesar 95% sehingga capaian kinerja **95%**, kategori **"berhasil"**.

95 %

☞ **Persentase Memfasilitasi Ranperda**

Indikator Persentase Memfasilitasi Ranperda ditargetkan pada akhir renstra

100%, sedangkan realisasi tahun 2022 tercapai **100%**, sehingga capaian kinerja 100%, kategori **“berhasil”**.

100 %

☞ **Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat DPRD Kab. Bone Tahun 2018-2023,

perbandingan predikat **“memuaskan”** dengan target **“memuaskan”** dengan capaian kinerja (5/5x100%) yaitu 100% Telah mencapai target akhir renstra, namun masih perlu perbaikan.

100 %

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Sekretariat DPRD melaksanakan urusan Pendukung bukan pelayanan dasar, sehingga tidak termasuk

perangkat daerah yang wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka mencapai tujuan/ sasaran

strategis dapat kita lihat pada table ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut :



Tabel 3.5
Analisi Penyebab Keberhasilan/ kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= s/d <110	60= s/d <90	<60
1	2	3	4	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Tercapai	Tidak Tercapai
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			114				
	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	114		√			
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD			97		√		
	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	95			√		
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100			√		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD			100				
	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB			√		
Rata – rata			103		√		

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian

indikator tujuan/sasaran strategis Sekretariat DPRD tahun 2022 dalam kategori **Berhasil/Tercapai.**

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

CAKUPAN REALISASI DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT) TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DEWAN TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Untuk mencapai target ini dilakukan langkah-langkah kebijakan, dengan melakukan pemantauan, survey

kepuasan Masyarakat (Pimpinan dan Anggota Dewan), baik melalui cuisioner, wawancara dan melalui online

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD :

1. Melakukan sinergitas antara pimpinan dan seluruh ASN yang ada di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD.
2. Meningkatkan potensi SDM Sekretariat DPRD dengan mengikuti bimtek atau pelatihan-pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

➤ **PERSENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DIAKOMODIR UNSUR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG DITINDAK LANJUTI OLEH DPRD.**

Untuk mencapai target ini maka dilakukan langkah-langkah kebijakan dengan mengakomodir seluruh

Aspirasi yang masuk melalui Sekretariat DPRD,

berikut langkah-langkah yang dilakuakn :

1. Meningkatkan sinergitas antara Sekretariat DPRD dan anggota DPRD untuk menyelesaikan seluruh aspirasi masyarakat.
2. Adanya komitmen Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat.
3. Membuka ruang pengaduan secara online, yang dapat diakses dengan cepat dan diharapkan dapat mempercepat proses penanganan aspirasi.

➤ **PERSENTASE MEMFASILITASI RANPERDA**

Untuk mencapai target ini maka dilakukan langkah-langkah kebijakan melalui komunikasi yang harmonis antara DPRD, Penginisiasi Ranperda, Tim Ahli Penyusunan Naskah

Akademik dan seluruh pihak yang terlibat sehingga dapat meminimalisir terjadinya mis komunikasi ataupun miskonsepsi dalam pembahasannya ranperda

Beberapa langkah yang dilakukan Sekretariat DPRD adalah :

1. Membuat AKP (Analisis Kebutuhan Perda) dengan mengikuti format terbaru, sesuai petunjuk Biro Hukum provinsi Sulawesi Selatan agar Perda yang dimasukkan pada Propemperda bisa lebih efektif dan tepat waktu dalam penyelesaiannya.
2. Melakukan Evaluasi Bersama alat kelengkapan DPRD yang membidangi Fungsi Legislasi (Bapemperda), terkait target waktu penyelesaian pembahasan Perda, baik itu perda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda maupun Perda Kumulatif Terbuka.

➤ PREDIKAT EVALUASI SAKIP OLEH APIP

Predikat Evaluasi SAKIP merupakan penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen Renstra, Renja RKA, DPA,

Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2021 Sekretariat DPRD menrrgetkan Predikat B dengan Penilaian yang

diperoleh dari hasil Review Inspektorat Daerah 70,87 dengan Predikat BB, Berikut Hasil Penilaiannya

NO.	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi (%)
A.	Perencanaan Kinerja	30	25,17
B.	Pengukuran Kinerja	25	19,69
C.	Pelaporan Kinerja	15	10,88
D.	Evaluasi Internal	10	6,00
E.	Pencapaian Kinerja	20	9,14
	Jumlah	100	70,87

Pencapaian diatas sudah mencapai target namun masih terdapat hambatan dalam pencapaian yang lebih

maksimal yakni dalam point Penjapaian Kinerja yang dilakukan Sekretariat DPRD belum maksimal.

Beberapa upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah :

- | | |
|---|--|
| 1. Pelaksanakan Rapat Kerja dalam Penyusunan dokumen perencanaan. | Capaian Kinerja Fisik dan keuangan setiap triwulan. |
| 2. Melakukan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. | 4. Melakukan langkah-langkah preventif dalam mencapai kinerja. |
| 3. Melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi | |

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Bone dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Bone

adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel

untuk menganalisis efisiensi sumber daya Sekretariat DPRD Kab. Bone dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan :

Tabel 3.6 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Targ et	Realisas i	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
A	B	C	D	e (d/c x100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i (e-h)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	74	87	116	3.149.992.000,-	3.128.604.583,-	99.32	14.68
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	100	95	95	14.647.005.750,-	14.447.798.757,-	98,63	-3,63
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100	100	100	511.005.800,-	504.516.140,-	98,73	1,27
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	BB	100	28.659.428.536,-	28.289.814.016,-	98,71	1,29

Sumber Data :Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kab.Bone

Berdasarkan Hasil analisis bahwa pada pelaksanaan efesiensi penggunaan sumber Kegiatan Sekretariat DPRD daya (anggaran) yaitu terdapat efesiensi anggaran dan Perbandingan antara kinerja dan efektivitas penggunaan dana anggaran, maka dapat dilihat berdasarkan kinerja





CAKUPAN REALISASI DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (INDEK KEPUASAN MASYARAKAT / ANGGOTA DEWAN)

Dengan capaian kinerja 116% dan capaian anggaran 99,32 menunjukkan bahwa efesiensi anggaran **0,68%** dan efesiensi penggunaan sumber daya sebesar **14,68 %**

PERSENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DIAKOMODIR UNSUR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, YANG DITINDAK LANJUTI OLEH DPRD

Dengan capaian kinerja 95% dan capaian anggaran **98,63** menunjukkan bahwa efesiensi anggaran **1,37%** Namun belum ada efesiensi penggunaan sumber daya .

PERSENTASE MEMFASILITASI RANPERDA

Dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran **98,73** menunjukkan bahwa efesiensi anggaran dan efesiensi penggunaan sumber daya sebesar **1,27%**

PREDIKAT EVALUASI SAKIP OLEH APIP

Dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran **98,71** menunjukkan bahwa efesiensi anggaran dan efesiensi penggunaan sumber daya sebesar **1.29%**

6. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja



Pencapaian Kinerja di dukung oleh 2 Program, 15 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar

Rp.46.967.482.086,-

Rincian program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD diurutkan sebagai berikut :



Tabel. 3.7 Analisis Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cap aian (%)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target(%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	116			74	87		
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD	95			100	95		
	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100			100	100		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	100	100	
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Pembentukan Peraturan Deaerah dan Peraturan DPRD	100	100	100	
			- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	100	Terbatasan pengelolaan Anggaran untuk kegiatan penyusunan Perda Inisiatif dan Inisiasi DPRD dan Padatnya Agenda DPRD
			- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas	9	9	100	
			- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan	2	2	100	
			- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan	Jumlah Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	2	2	100	

			dan/atau Akademik Naskah					Sehingga Penetapan Perda Kadang Terlambat
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100	
			- Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang dibahas di DPRD	1	1	100	Terbatasnya Alokasi Pagu Anggaran untuk sekretariat DPRD sehingga Renja DPRD dan Alokasi Pagu Anggaran Tidak Sesuai Untuk Memenuhi Penganggara n Rencana Kerja DPRD meningkatkan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Pengawasan, Anggaran dan Legislasi
			- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas di DPRD	1	1	100	
			- Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD yang dibahas di DPRD	1	1	100	
			- Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Pembahasan APBD Perubahan yang dibahas di DPRD	1	1	100	
			- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD dibahas di DPRD	1	1	100	
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dilaksanakan Oleh Anggota DPRD	100	100	100	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12	12	100	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Oleh Anggota DPRD	12	12	100	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Anggota DPRD	12	12	100	
			- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Anggota DPRD	12	12	100	
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100	100	100	
			- Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD	3	3	100	
			- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pembayaran media yang menyediakan bahan bacaan dan peraturan	48	48	100	

			- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang dibayarkan	5	5	100	
			- Penyediaan Tenaga Ahli fraksi	Jumlah Jasa Tenaga Ahli Fraksi yang Dibayarkan	8	8	100	
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan Anggota DPRD	100	100	100	
			- Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan kunjungan kerja keluar daerah yang dilaksanakan	46	46	100	
			- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5	5	100	
			- Pelaksanaan RESES	Jumlah Pelaksanaan RESES dilakukan Oleh Anggota DPRD	3	3	100	
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD yang di Fasilitasi Sekretariat DPRD	100	100	100	
			- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	12	100	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB				BB		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100	100	100	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	100	
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang tersusun	5	5	100	Kurangnya Pemahaman ASN untuk secara aktif mengikuti alur perencanaan berdasarkan renja dan
			- Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	2	2	100	
			- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	2	2		
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun	2	2	100	

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					renstra
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100	100	100	
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	39	39	100	
			- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100	
			- Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12		
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	3	100	
			- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	12	12	100	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja pada Sekretariat DPRD	100	100	100	
			- Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	5	100	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan yang diikuti oleh Sekertariat DPRD	0	0	0	
			- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan yang diikuti oleh Sekertariat DPRD	1	1	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	100	100	
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	6	100	

			-				
			- Bangunan Kantor				
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	100
			- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	12	100
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	12	100
			- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	100
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48	48	100
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	155	155	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	99,24	100
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan Sekretariat DPRD	12	12	100
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Wifi dan Listrik yang dibayarkan	3	3	100
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan jasa keuangan selama satu tahun	116	115	99
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Realisasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	100	100
			- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Gaji dan Tunjangan DPRD yang dibayarkan	45	45	100
			- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	0	0	0
			- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketersediaan Medical Check Up yang Dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	4	-	66.67
			Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan Layanan Administrasi DPRD	100	100	0

			- Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang di Fasilitas Sekretariat DPRD	2	2	100	
			- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna, Kelengkapan Dewan, Pembahasan Ranperda yang	12	12	100	
			- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Bahan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	12	12	100	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	67.17	0	
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14	11	100	Belum maksimalnya sumber daya manusia dan juga sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga pelayanan Administrasi Perkantoran juga belum menunjukkan hasil yang maksimal
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional	7	7	100	
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, pajak perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	29	29	100	
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	215	215	100	
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	6	6	100	

Sumber Data : Bagian Keuangan Sekretariat DPRD

➤ Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja

sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Cakupan Realisasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
2. Seluruh ASN maupun tenaga kontrak di lingkup Sekretariat DPRD wajib meningkatkan potensi dirinya dengan mengikuti Pendidikan baik formal maupun non formal dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang ditindak lanjuti oleh DPRD

1. Membuka ruang pengaduan secara online, yang dapat diakses dengan cepat dan diharapkan dapat mempercepat proses penanganan aspirasi.
2. Melakukan Hearing/ Dialog dengan pejabat pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh agama membahas permasalahan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.
3. Melakukan kunjungan kerja sesuai permasalahan dilapangan, dan mengambil keputusan/ kebijakan Bersama stakeholder dan masyarakat.

Persentase Memfasilitasi Ranperda



1. Membuat AKP (Analisis Kebutuhan Perda) dengan mengikuti format terbaru, sesuai petunjuk Biro Hukum provinsi Sulawesi Selatan agar Perda yang dimasukkan pada Propemperda bisa lebih efektif dan tepat waktu dalam penyelesaiannya.
2. Melakukan Evaluasi Bersama alat kelengkapan DPRD yang membidangi Fungsi Legislasi (Bapemperda), terkait target waktu penyelesaian pembahasan Perda, baik itu perda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda maupun perda Komulati Terbuka.
3. Melakukan kunjungan kerja sesuai permasalahan dilapangan, dan mengambil keputusan/ kebijakan Bersama stakeholder dan masyarakat.

Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

Akan dilakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan Rapat Internal Secara Intensif untuk membahas tata kelola dan juga melakukan evaluasi internal secara berkala terkait kinerja masing-masing ASN sesuai dengan target dalam perjanjian kinerja.

2. Mengikuti Bimbingan Teknis, kursus singkat, seminar serta kegiatan-kegiatan yang menambah wawasan aparat Sekretariat DPRD.



Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Sekretariat DRPR Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar **Rp. 46.967.482.086,-** (Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Program	Jumlah (Rp)		Persentase
			Anggaran	Realisasi	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Program Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.308.053.550,-	18.080.919.480,-	98.71
Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang diakomodir unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat Yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, yang Ditindak Lanjuti Oleh DPRD				
	Persentase Memfasilitasi Ranperda				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	28.659.428.536,-	28.289.814.016,-	98,76%
TOTAL			46.967.482.086,-	46.370.733.496,-	98,73%

04

PENUTUP

- ☞ **Simpulan Umum**
- ☞ **Kendala Pelaksanaan & Upaya Mengatasi**

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga

menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Rata-rata capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2022 tercapai 103 %

Bagi instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sendiri, ini bisa berarti

perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan

akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan saran terdapat

1. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat DPR D kabupaten Bone.
2. Memberikan peluang dan kesempatan kepala seluruh ASN maupun tenaga kontrak di lingkup Sekretariat DPRD untuk meningkatkan potensi dirinya dengan mengikuti Pendidikan baik formal maupun non formal.
3. Membuka ruang pengaduan secara online, yang dapat diakses dengan cepat dan diharapkan dapat mempercepat proses penanganan aspirasi.

beberapa kendala dan upaya untuk mengatasinya :

1. Membuat AKP (Analisis Kebutuhan Perda) dengan mengikuti format terbaru, sesuai petunjuk Biro Hukum provinsi Sulawesi Selatan agar Perda yang dimasukkan pada Propemperda bisa lebih efektif dan tepat waktu dalam penyelesaiannya.
2. Melakukan Evaluasi Bersama alat kelengkapan DPRD yang membidangi Fungsi Legislasi (Bapemperda), terkait target waktu penyelesaian pembahasan Perda, baik itu perda yang telah ditetapkan kedalam Propemperda maupun perda Komulati Terbuka.
3. Kunjungan Kerja dilapangan, dan mengambil keputusan/ kebijakan Bersama stakeholder dan masyarakat.



QR Data Dukung Capaian Kinerja 2022

https://drive.google.com/file/d/1Chq9N9qp9O8kJrOSCcEGOGnbqQOMER9i/view?usp=share_link

PENGHARGAAN TAHUN 2022 :

1. Instansi Terbaik Dalam Pengumpulan Data Bone Dalam Angka 2022



PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

OPD Peringkat Pertama dengan Tax Ratio Tertinggi Tahun 2021
Kategori Pagu Anggaran di Atas 25 Miliar Rupiah

Terima kasih atas kontribusi secara nyata kepada negara melalui pembayaran pajak.
Semoga negara yang kita cintai mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Watampone, 18 November 2022



Hadinengrat Nusantara MP

Kepala KPP Pratama Watampone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA :

SEKRETARIAT DPRD

ATAS PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN ANGGARAN 2021

Watampone, 1 Desember 2022
BUPATI BONE



DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

memberikan

Nilai dan Penghargaan

kepada

SEKRETARIAT DPRD

atas prestasinya Sebagai

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021

dengan Predikat Nilai

MEMUASKAN

Watampone, 12 Januari 2022

BUPATI BONE

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si

Penghargaan Instansi Terbaik Dalam Pengumpulan Data Bone Dalam Angka 2022

